

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Instansi Pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 angka 15, definisi Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. Sedangkan, menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 1 angka 20 instansi pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 14, definisi Instansi Pemerintah adalah:

“perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari: Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TN (meliputi: Markas Besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut), Kepolisian Republik Indonesia. Kantor Perwakilan Pemerintah RI di Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Perangkat Pemerintahan Provinsi, Perangkat Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan lembaga/badan lainnya yang dibiayai dari anggaran negara.”

Penyelenggaraan instansi pemerintah dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2 Kinerja Instansi Pemerintah

2.1.2.1 Pengertian Kinerja Instansi Pemerintah

Pemerintahan yang baik dapat terwujud jika adanya kinerja instansi pemerintah yang baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No: 239/IX/6/8/2003, kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Kinerja instansi pemerintah merupakan keseluruhan capaian atau hasilhasil selama pelaksanaan otonom daerah. Untuk mencapai tingkat kinerja seperti yang diharapkan perlu dirumuskan rencana kinerja yang memuat penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis suatu instansi pemerintah (Nasir, 2013).

Banyak pendapat para ahli terkait dengan kinerja pemerintah daerah, baik dari sisi definisi, pengukuran, indikator, dan evaluasi kinerja. Setelah

suatu sistem pengelolaan keuangan terbentuk, perlu disiapkan suatu alat untuk mengukur kinerja dan mengendalikan pemerintahan agar tidak terjadi KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), tidak adanya kepastian hukum dan stabilitas politik serta ketidakjelasan arah dan kebijakan pembangunan. Pengukuran kinerja memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas diperlukan manajemen kinerja yang terdapat di dalam indikator kinerja dan target kinerja. Pelaporan kinerja dan mekanisme *reward and punishment*. Indikator pengukuran kinerja yang baik mempunyai karakteristik *relevant, unambiguous, cost-effective* dan *simple* serta berfungsi sebagai sinyal yang menunjukkan bahwa terdapat masalah yang memerlukan tindakan manajemen dan investigasi lebih lanjut (Sumarsono, 2010: 84).

Pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dapat dilakukan dengan 2 pendekatan. Pertama, melihat kinerja organisasi publik dari perspektif birokrasi itu sendiri. Kedua, melihat kinerja organisasi publik dari perspektif kelompok sasaran atau pengguna jasa organisasi publik. Kedua perspektif tersebut saling berinteraksi di antara keduanya, karena pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik sangat terkait erat dengan lingkungan tempat organisasi publik hidup dan berkembang. Khusus mengenai organisasi publik berkaitan erat dengan produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, akuntabilitas, serta persamaan pelayanan. Konsep yang sering dipergunakan untuk melihat kinerja organisasi publik daerah sering dikaitkan dengan penggunaan anggaran.

Konsep ini sering dikenal dengan istilah *performance in term of the monetary calculus of efficiency* (Mardiasmo, 2018:5)

2.1.2.2 Penilaian dan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Permenpan No.25 Tahun 2012, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (*assessment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Indikator untuk mengukur kinerja instansi pemerintah menurut Bastian (2005) di antaranya sebagai berikut:

1) Masukan (*inputs*)

Masukan adalah semua jenis sumber daya yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan output. Input dibagikan menjadi dua yaitu input primer dan input sekunder. Input primer berupa kas sedangkan input sekunder adalah berupa bahan baku, personel, infrastruktur dan masukan lainnya yang digunakan untuk menghasilkan output tertentu.

2) Keluaran (*outputs*)

Keluaran adalah produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.

3) Hasil (*outcome*)

Outcome adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau kegiatan

dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Pengukuran outcome adalah pengukuran dampak sosial suatu aktivitas. Indikator kinerja *outcome* dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai peningkatan kuantitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, peningkatan efektivitas dan peningkatan pendapatan.

4) Manfaat (*benefit*)

Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indicator hasil. Manfaat tersebut akan kelihatan setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal, yaitu tepat lokasi dan tepat waktu.

5) Dampak (*impact*)

Indikator dampak memberikan gambaran mengenai efek langsung atau tidak langsung yang dihasilkan dari tercapainya tujuan program. Dampak merupakan *outcome* pada tingkat yang lebih tinggi hingga batas tertentu. Indikator ini mengukur outcome yang lebih makro.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program/kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut atau mencapai keberhasilan yang ditargetkan pada saat perencanaan (Nordiawan dan Hertianti, 2010). Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja instansi pemerintah merupakan suatu keberhasilan yang telah dilakukan dan dicapai oleh instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah bertujuan untuk menilai dan melihat apakah program atau kegiatan telah dilakukan sesuai target dan rencana.

2.1.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi adalah suatu jaringan komputer yang terdiri atas berbagai komponen pemrosesan informasi yang menggunakan berbagai jenis hardware, software, manajemen data, dan teknologi jaringan informasi (James, 2006). Menurut Aji (2005), informasi adalah data yang terolah dan sifatnya menjadi data lain yang bermanfaat dan biasa disebut informasi. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku untuk menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan (Wijana, 2007).

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang menjelaskan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan:

“suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.”

Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja suatu instansi pemerintah maupun kinerja individu yang bersangkutan. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Menurut Hamzah (2009) ada 4 indikator dari pemanfaatan teknologi informasi, yaitu:

- 1) Pengolah Data
- 2) Pengolahan Informasi
- 3) Sistem Manajemen
- 4) Proses Kerja secara Elektronik

Pemanfaatan Teknologi Informasi pada penelitian ini diukur menggunakan indikator menurut Hamzah (2009) menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Amri (2019).

2.1.4 Perencanaan Penyusunan Anggaran

2.1.4.1 Pengertian Anggaran

Pengertian perencanaan menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 adalah suatu proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa depan, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategis, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku, yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan (Iskandar, 2013). Sedangkan, anggaran adalah alat perencanaan anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja tersebut (Halim dan Kusufi, 2014).

Perencanaan Penyusunan Anggaran atau *budgeting* merupakan sebuah rencana yang dibuat juga disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam perusahaan untuk periode dan jangka waktu tertentu di masa mendatang. (Mardiasmo, 2009). Perencanaan penyusunan anggaran dalam suatu organisasi adalah cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran anggaran. Dapat disimpulkan bahwa jika tidak ada konsep perencanaan penggunaan anggaran secara riil tentu akan berdampak pada munculnya sejumlah kesulitan dalam mengarahkan penggunaan anggaran dengan tepat sasaran.

2.1.4.2 Fungsi Anggaran

Menurut Mardiasmo (2009), anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- 1) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
- 2) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.
- 3) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
- 4) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

Perencanaan anggaran dibutuhkan agar suatu instansi/organisasi dapat berjalan seimbang antara jalannya keuangan dan jalannya kegiatan. Perencanaan anggaran yang baik haruslah mencakup seluruh kegiatan instansi/organisasi sehingga fungsi anggaran dapat berjalan dengan baik. Menurut Iskandar (2013) ada 2 indikator dari perencanaan anggaran, yaitu:

- 1) Perencanaan anggaran diawali dari pelaksanaan musrenbang.
- 2) Perencanaan anggaran dilakukan melalui proses yang terkoordinasi.

2.1.4.3 Manfaat Anggaran

Menurut Nurfitriana (2011:15) anggaran mempunyai beberapa manfaat antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, berarti anggaran mewakili kesepakatan negosiasi diantara partisipan yang dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan di masa yang akan datang.
- 2) Anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blue print aktivitas perusahaan.
- 3) Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen (*divisi*) yang satu dengan departemen (*divisi*) lainnya dalam

organisasi maupun dengan manajemen puncak.

- 4) Anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.
- 5) Anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah pada manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah.
- 6) Anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan antara tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan.

Perencanaan penyusunan anggaran pada penelitian ini diukur menggunakan indikator menurut Iskandar (2013) menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Haslinda (2016).

2.2 Kerangka Konseptual

Menurut Supriyono (2018), teori keagenan adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara *principal* (pemberi kontrak) dan *agent* (penerima kontrak). *Principal* mengontrak *agent* untuk bekerja demi tujuan *principal* dengan memberikan wewenang pembuatan keputusan kepada *agent* untuk mencapai tujuan tersebut. Pada penelitian ini, hubungan antara *principal* dan *agent* dalam pemerintahan ditunjukkan dengan adanya hubungan antara masyarakat dan instansi pemerintah, dimana masyarakat berperan sebagai *principal* sementara instansi pemerintah berperan sebagai *agent*.

Masyarakat sebagai pihak pemberi kontrak (*principal*) memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban atas sumber daya yang digunakan

oleh instansi pemerintah serta memiliki wewenang untuk mengawasi tindakan instansi pemerintah (*agent*) agar tetap berjalan sesuai dengan rencana. Instansi pemerintah sebagai pihak penerima kontrak (*agent*) memiliki kewajiban untuk melaporkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini, instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan kinerja yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan adanya pengawasan dari masyarakat, maka instansi pemerintah akan didorong untuk memaksimalkan kinerjanya demi terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja

Instansi Pemerintah

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku untuk menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan (Wijana, 2007).

Salah satu manfaat yang diharapkan adalah seperti peningkatan kinerja yang merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Semakin ahli dan terampil dalam memanfaatkan teknologi informasi, maka pekerjaan akan cepat terselesaikan. Pemanfaatan teknologi informasi yang

tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja instansi maupun kinerja individu yang bersangkutan.

2.3.2 Hubungan Perencanaan Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Pengertian perencanaan menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 adalah suatu proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa depan, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan, anggaran adalah alat perencanaan anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja tersebut (Halim dan Kusufi, 2014). Dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran dalam suatu organisasi adalah cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran anggaran.

Perencanaan penyusunan anggaran yang baik dapat membantu peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya yang tersedia dan memanfaatkannya untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan anggaran yang baik sebaiknya juga terdokumentasi dengan baik sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan, pencapaian tujuan dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja suatu instansi pemerintah.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang menguji kinerja instansi pemerintah telah banyak dilakukan. Dalam menyusun penelitian ini, peneliti memilih lima penelitian untuk dijadikan sebagai penelitian terdahulu. Penelitian pertama dilakukan oleh Nurlaili (2014) meneliti tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah yang dilakukan pada kepala atau sub bagian pada unit kerja yang ada pada setiap SKPD Kabupaten Jember, serta pegawai yang telah bekerja minimal satu tahun di jabatan yang sama. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah Kabupaten Jember.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Haslinda (2016) mengenai pengaruh perencanaan anggaran dan evaluasi anggaran terhadap kinerja organisasi pemerintah daerah dilakukan pada seluruh pegawai pada SKPD dengan sampel Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Inspektorat, Kepala Sub Bagian, dan Sekretaris Daerah pada Kabupaten Wajo. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini memberikan hasil yang menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan evaluasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi pemerintah Kabupaten Wajo.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Damayanti (2017) mengenai pengaruh pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan akuntabilitas public terhadap kinerja instansi pemerintah dilakukan pada seluruh staff bagian Bidang Umum dan Kepegawaian pada SKPD Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier linier berganda untuk pengujian hipotesisnya. Penelitian ini memberikan hasil yang menunjukkan bahwa pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Amri (2019) tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah dilakukan pada seluruh pegawai pada unit kerja yang ada pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Bulukumba yang berjumlah 30 orang. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Subjek Penelitian	Hasil
Amri (2019)	Variabel Independen : X1 = Pemanfaatan Teknologi Informasi X2 = Pengendalian Intern Variabel Dependen : Y = Kinerja Instansi Pemerintah	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba	Pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.
Damayanti (2017)	Variabel Independen : X1 = Pengendalian Internal X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi X3 = Akuntabilitas Publik Variabel Dependen : Y = Kinerja Instansi Pemerintah	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Serdang	Pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan akuntabilitas publik memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Haslinda (2016)	Variabel Independen : X1 = Perencanaan Anggaran X2 = Evaluasi Anggaran	Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo	Perencanaan anggaran dan evaluasi anggaran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan

	Variabel Dependen : Y = Kinerja Organisasi		terhadap kinerja organisasi pemerintah Kabupaten Wajo.
Nurlaili (2014)	Variabel Independen : X1 = Pemanfaatan Teknologi Informasi X2 = Pengendalian Internal Variabel Dependen : Y = Kinerja Instansi Pemerintah	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jember	Pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah Kabupaten Jember.

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Teknologi informasi selain berfungsi sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga memiliki fungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyampaian dan penyebaran informasi. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Wijana (2007) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Salah satu manfaat yang diharapkan seperti peningkatan kinerja yang merupakan bagian dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terciptanya pemanfaatan teknologi informasi yang baik dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam mengelola keuangan

daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Selain itu, dengan adanya optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja akan mendorong kinerja instansi secara terpadu. Teori ini diperkuat oleh penelitian Nurlaili (2014), Damayanti (2017), dan Amri (2019) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

HA1 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah

2.5.2 Pengaruh Perencanaan Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Pengertian perencanaan menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 adalah suatu proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa depan, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan, anggaran adalah alat perencanaan anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja tersebut (Halim dan Kusufi, 2014). Dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran dalam suatu organisasi adalah cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran anggaran.

Perencanaan anggaran yang baik dapat membantu peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya yang tersedia dan memanfaatkannya untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan anggaran yang baik sebaiknya juga terdokumentasi dengan baik sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan, pencapaian tujuan dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja suatu instansi pemerintah.

Teori ini diperkuat oleh penelitian Nurlaili (2014), Damayanti (2017),

dan Amri (2019) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

HA2 : Perencanaan penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

